

BAB I

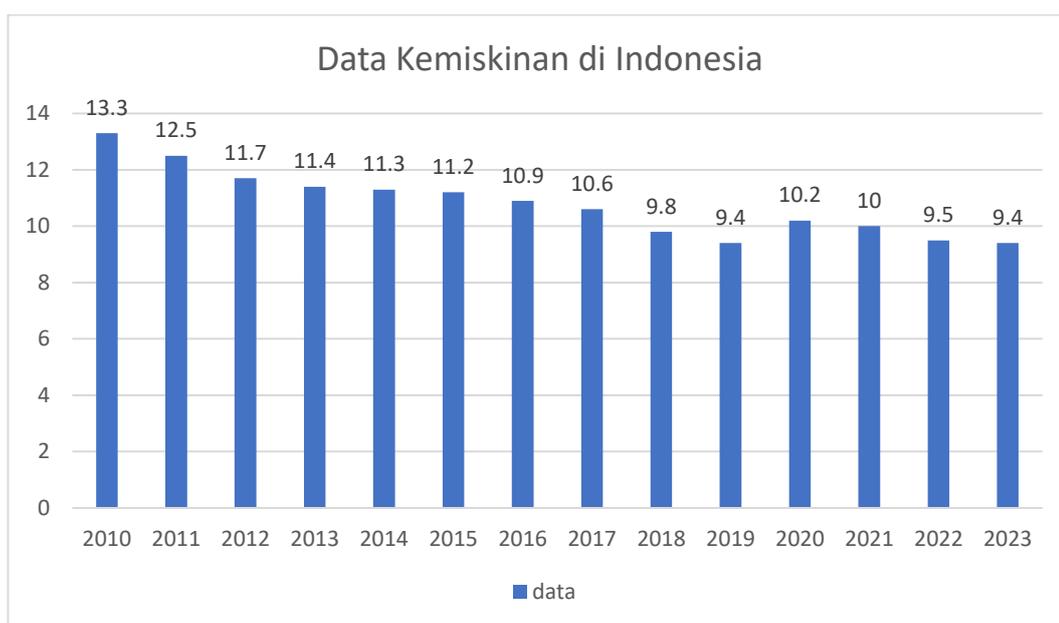
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang. Kemiskinan dapat memberikan dampak negatif yang luas terhadap suatu negara, tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Ravallion, sebagaimana dikutip dalam Barika (2013), menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, serta ketidakmampuan untuk mendapatkan pengobatan saat sakit. Orang miskin cenderung tidak dapat membaca karena tidak memiliki akses pendidikan, tidak memiliki pekerjaan, merasa takut akan masa depan, dan kehilangan anggota keluarga akibat penyakit. Kemiskinan juga mencerminkan ketidakberdayaan, keterpinggiran, dan hilangnya kebebasan. Permasalahan Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan pendekatan terpadu. Istilah kemiskinan digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum berdasarkan standar hidup tertentu (Ilham, 2019).

Bagi negara berkembang, masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati oleh PBB hingga tahun 2030.

Menurut World Bank (2021), Indonesia termasuk salah satu negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu yang telah ada sejak masa pasca-kemerdekaan dan terus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk diselesaikan. Kemiskinan biasanya diartikan sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin, yang pada akhirnya memengaruhi pembangunan dan ekonomi secara keseluruhan, merupakan salah satu sasaran utama pembangunan nasional. Kemiskinan sendiri dianggap sebagai indikator sosial utama sekaligus akar dari berbagai permasalahan Pembangunan (Salman Alfarsi Abdillah Qurais, 2023)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Gambar 1. 1 Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010 – 2023

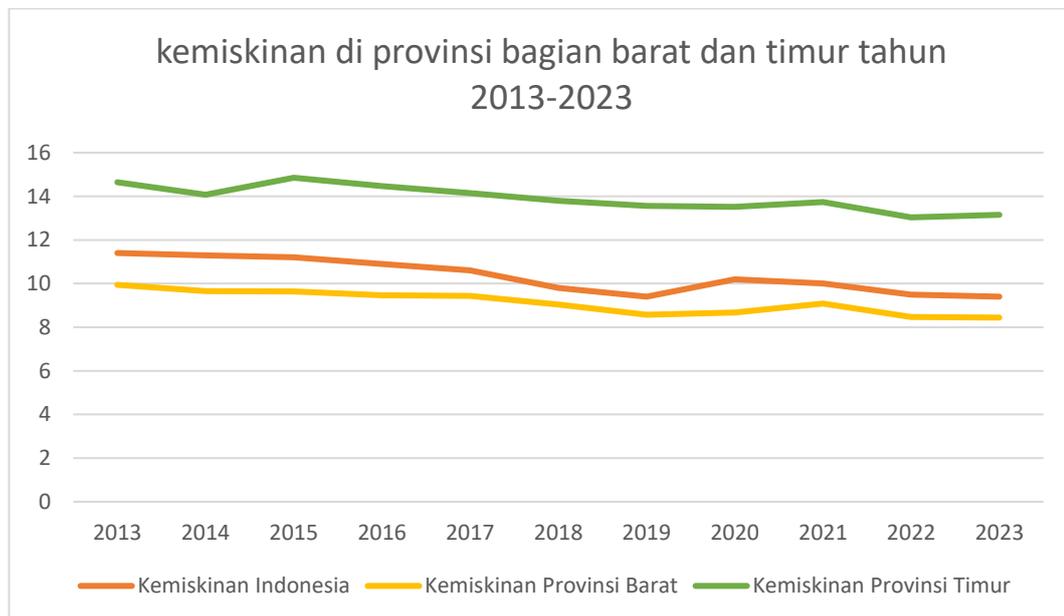
Berdasarkan dari Grafik 1.1 Data Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010 – 2023 bahwa kemiskinan Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023 adanya tren penurunan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010,

angka kemiskinan tercatat sebesar 13,3%. Angka ini terus menurun hingga mencapai 9,4% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik dalam bentuk bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, telah memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Beberapa tahun di Indonesia mana penurunan kemiskinan tidak terlalu signifikan, bahkan mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan dari 9,4% (2019) menjadi 10,2% yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Setelah itu, angka kemiskinan kembali menurun secara perlahan hingga mencapai 9,4% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, maupun kebijakan pemerintah. Hal ini efektivitas program-program pemerintah, termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah dan strategi-strategi pembangunan yang inklusif, menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan penurunan kemiskinan ke depan.

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary S. Becker menekankan pentingnya investasi pada sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, beberapa faktor berkontribusi terhadap pembangunan human capital, seperti tingkat pendidikan yang menentukan kualitas keterampilan tenaga kerja, di Indonesia, human capital juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya saing global. Kajian oleh Juwita (2019) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan dan relevansi keterampilan yang

diajarkan dengan kebutuhan industriSecara keseluruhan, baik dalam konteks global maupun lokal.

Human capital yang terdiri dari sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua variabel yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada individu yang mendorong produktivitas, sementara kesehatan berperan dalam memastikan individu memiliki kualitas hidup yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara maksimal dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Suryandari dan Rismawati (2017), "investasi dalam pendidikan dan kesehatan memberikan dampak yang besar dalam pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas SDM yang produktif.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2023

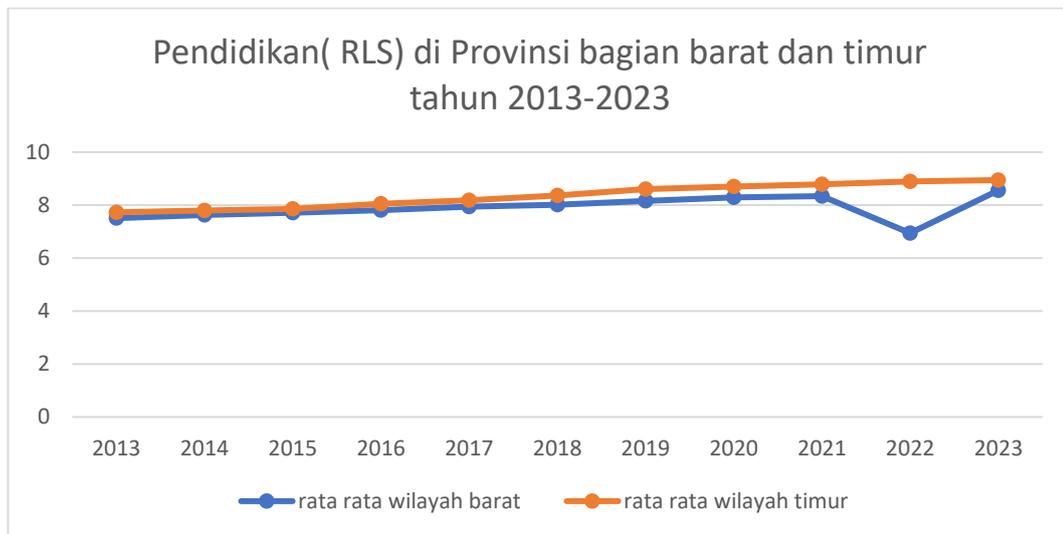
Gambar 1. 2 Data Kemiskinan di Provinsi bagian barat dan timur Tahun 2013– 2023

Berdasarkan dari Grafik 1.2 Data Kemiskinan di Provinsi bagian barat dan timur Tahun 2013– 2023 di atas memperlihatkan perkembangan tingkat kemiskinan

di Indonesia, provinsi bagian barat, dan provinsi bagian timur pada periode 2013 hingga 2023. Data ini memberikan gambaran mengenai disparitas tingkat kemiskinan antar wilayah di Indonesia. Secara umum, tingkat kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan yang stabil. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan nasional berada pada kisaran 11%, dan secara perlahan menurun hingga mencapai sekitar 9% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Jika dilihat berdasarkan wilayah, provinsi bagian barat menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan provinsi bagian timur. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di provinsi bagian barat tercatat sekitar 10%, sedangkan di provinsi bagian timur masih cukup tinggi, yaitu sekitar 14–15%. Sepanjang periode 2013–2023, kemiskinan di provinsi bagian barat terus mengalami penurunan bertahap hingga mencapai angka sekitar 8% pada tahun 2023. Sementara itu, meskipun tingkat kemiskinan di provinsi bagian timur juga mengalami penurunan, angkanya tetap berada pada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat, yaitu sekitar 13% pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Timur secara konsisten, provinsi bagian Timur mencatatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi bagian Barat dalam semua tahun pengamatan. Hal ini menegaskan bahwa wilayah Timur menghadapi tantangan struktural yang lebih berat dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan, wilayah Barat memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan relatif stabil dengan fluktuasi yang juga teratur namun dalam rentang nilai yang lebih kecil. Dapat dilihat pula bahwa persentase kemiskinan di Indonesia

cenderung konstan, tidak ada fluktuasi yang terlalu tajam. Terlihat juga di beberapa tahun, persentase kemiskinan di wilayah Barat dan Timur masih di bawah persentase kemiskinan Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2023

Gambar 1.3 Data Pendidikan (Rata rata lama Sekolah) di provinsi bagian barat Tahun 2013– 2023

Berdasarkan dari Grafik 1.3 Data Pendidikan (Rata rata Lama Sekolah) di provinsi bagian barat Tahun 2013– 2023 Data ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari lima provinsi representatif untuk masing-masing wilayah. Wilayah barat diwakili oleh Provinsi Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Jawa Timur. Adapun wilayah timur mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. diketahui bahwa terdapat tren peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di wilayah provinsi bagian barat dan timur Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 hingga 2023. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pencapaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, serta mencerminkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah.

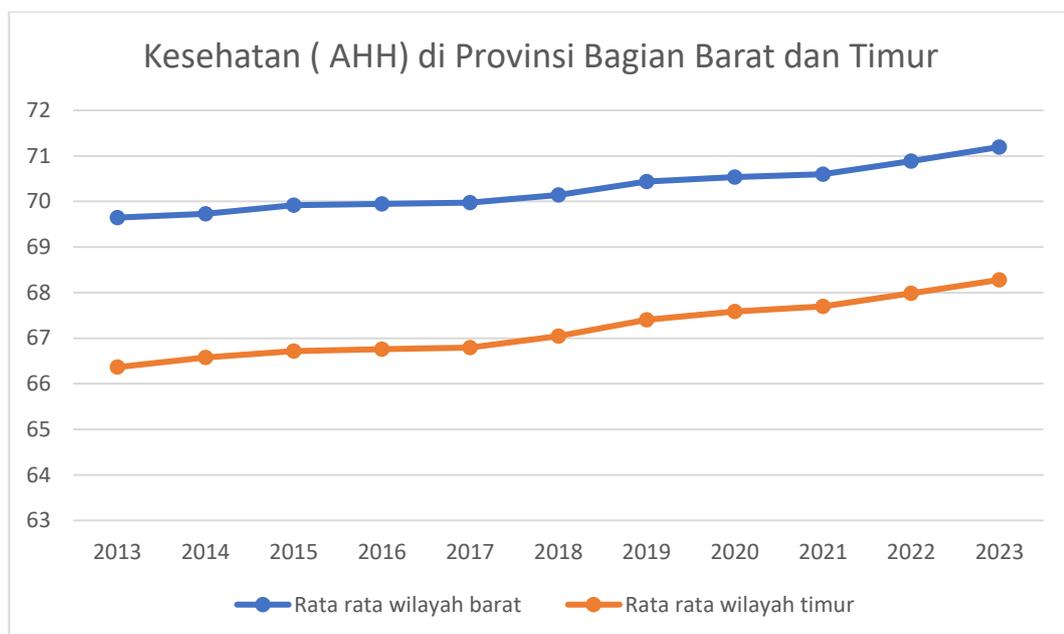
Data ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan partisipasi pendidikan dalam jangka panjang di kedua wilayah, meskipun terdapat dinamika dan perbedaan tren antarwilayah. wilayah timur menunjukkan tren pertumbuhan RLS yang relatif stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dari angka 7,388 tahun pada 2013, meningkat menjadi 8,944 tahun pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses terhadap pendidikan formal serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di wilayah timur. Tidak terlihat adanya penurunan signifikan sepanjang periode tersebut, yang mengindikasikan efektivitas program pendidikan dan stabilitas sistem pendidikan di wilayah tersebut.

Berbeda halnya dengan wilayah barat, meskipun pada dasarnya juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 hingga 2021 (dari 7,336 tahun menjadi 8,892 tahun), namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2022, di mana RLS jatuh ke angka 6,942 tahun. Penurunan ini merupakan penyimpangan signifikan dari pola tren sebelumnya dan dapat mencerminkan adanya gangguan serius terhadap kelangsungan pendidikan, baik akibat dampak pandemi COVID-19, perubahan pola pelaporan, maupun fenomena sosial-ekonomi seperti meningkatnya angka putus sekolah atau mobilitas penduduk. Fenomena ini patut menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pendidikan, terutama di wilayah barat yang selama ini diasumsikan memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan wilayah timur.

Namun demikian, pada tahun 2023, RLS wilayah barat kembali meningkat ke angka 8,944 tahun, menyamai capaian wilayah timur. Pemulihan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di wilayah barat memiliki kapasitas adaptif

yang cukup baik terhadap kondisi darurat atau gangguan yang bersifat temporer. Walaupun demikian, fluktuasi yang tajam ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pendidikan agar lebih tahan terhadap krisis dan perubahan sosial.

Jika dilihat secara keseluruhan, kesenjangan RLS antara wilayah barat dan timur cenderung menurun, bahkan pada beberapa tahun terakhir wilayah timur menunjukkan performa yang lebih stabil. Fakta ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antarwilayah mulai dapat ditekan, seiring dengan pelaksanaan program pemerataan pembangunan dan perluasan akses pendidikan di kawasan timur Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2023

Gambar 1. 4 Data Kesehatan (AHH) di provinsi bagian Barat dan Timur Tahun 2013 – 2023

Berdasarkan dari Grafik 1.4 Data Kesehatan (AHH)di provinsi bagian barat dan Timur Tahun 2013– 2023 Berdasarkan dari Grafik 1.4 Data Kesehatan (AHH)di provinsi bagian barat dan Timur Tahun 2013– 2023 di atas perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di wilayah provinsi bagian barat dan timur Indonesia selama periode 2013 hingga 2023. Data ini merupakan hasil

perhitungan rata-rata dari lima provinsi representatif untuk masing-masing wilayah. Wilayah barat diwakili oleh Provinsi Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Jawa Timur. Adapun wilayah timur mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Secara umum, terlihat bahwa AHH di kedua wilayah mengalami peningkatan yang konsisten selama satu dekade terakhir. Di wilayah barat, AHH meningkat dari 69,646 tahun pada tahun 2013 menjadi 71,196 tahun pada tahun 2023. Kenaikan ini bersifat linier dan stabil, menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah tersebut. Setiap tahun, peningkatan AHH di wilayah barat berada dalam kisaran 0,1–0,3 tahun, yang mencerminkan pertumbuhan berkelanjutan namun moderat.

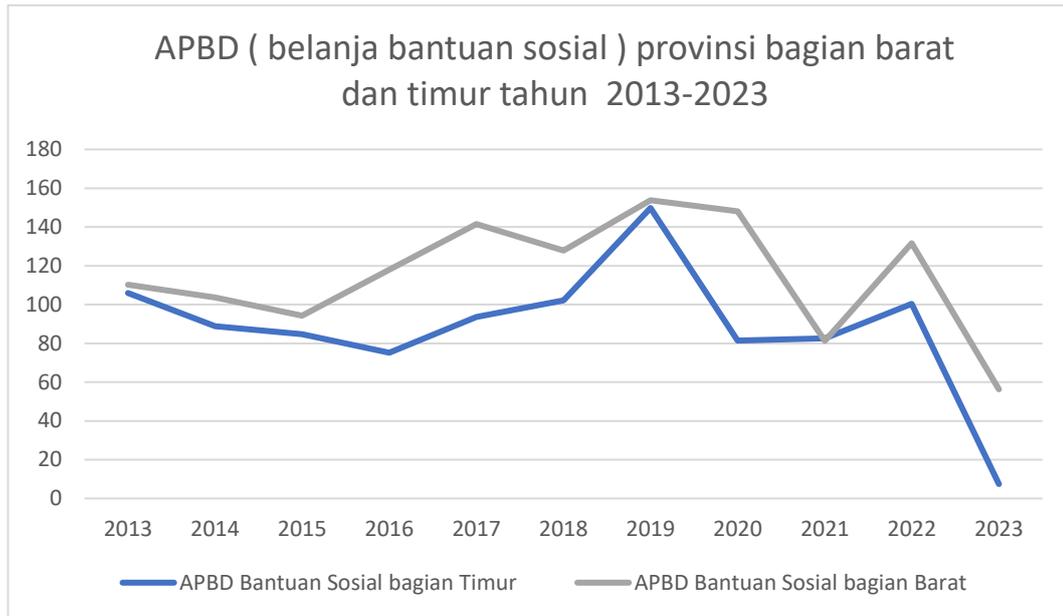
Sementara itu, wilayah timur juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meskipun secara umum AHH di wilayah ini masih berada di bawah wilayah barat. Pada tahun 2013, AHH di wilayah timur tercatat sebesar 66,364 tahun dan meningkat menjadi 68,28 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor kesehatan di wilayah timur, meskipun kesenjangan angka harapan hidup antara wilayah timur dan barat masih cukup terlihat, dengan selisih sekitar 2–3 tahun setiap tahunnya.

Kesenjangan AHH antara kedua wilayah mencerminkan ketimpangan dalam aspek pembangunan kesehatan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbedaan dalam infrastruktur, akses terhadap tenaga medis, kualitas layanan kesehatan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah.

Meskipun demikian, laju peningkatan AHH yang cukup konsisten di wilayah timur menunjukkan bahwa intervensi kebijakan kesehatan di daerah tertinggal mulai menunjukkan hasil yang positif.

Dengan demikian, meskipun wilayah barat masih unggul dalam hal AHH, pertumbuhan yang terjadi di wilayah timur merupakan indikator yang menjanjikan bagi upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hal ini perlu terus diperkuat melalui distribusi fasilitas kesehatan yang lebih merata, peningkatan tenaga kesehatan di daerah terpencil, serta peningkatan edukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat untuk mendukung peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dari Grafik 1.4 Data kesehatan di provinsi bagian Timur Tahun 2013–2023 menampilkan dinamika pertumbuhan sosial yang positif di wilayah timur Indonesia, namun juga menyoroti adanya kesenjangan antar wilayah yang mengindikasikan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan terfokus di daerah-daerah dengan capaian terendah, agar tercapai kesetaraan dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan di seluruh provinsi Indonesia bagian timur (Saputri & Nainggolan, 2023)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013-2023

Gambar 1. 5 Data APBD (belanja bantuan sosial) Provinsi Bagian Barat dan Timur Tahun 2013-2023

Berdasarkan dari Grafik 1.5 data APBD (belanja bantuan sosial) Provinsi Bagian Barat dan Timur Tahun 2013-2023 di atas menunjukkan perkembangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang belanja bantuan sosial di provinsi bagian barat dan timur . Data ini diambil dari lima provinsi perwakilan bagian barat, yaitu Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Jawa Timur, serta lima provinsi bagian timur, yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Alokasi APBD untuk bantuan sosial di provinsi bagian barat cenderung lebih tinggi dibandingkan provinsi bagian timur sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2013, alokasi APBD bantuan sosial di wilayah barat sebesar 118,3, sedikit lebih tinggi dibandingkan wilayah timur yang sebesar 108,3. Di bagian barat, alokasi APBD terus meningkat, mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar

159,8 sebelum mulai mengalami penurunan signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19, hingga mencapai angka 56,3 pada tahun 2023. Provinsi bagian timur memperlihatkan tren yang lebih fluktuatif. Pada awalnya, alokasi anggaran di tahun 2013 sebesar 108,3, kemudian menurun hingga mencapai titik terendah di tahun 2016 sebesar 75,2. Setelah itu, terdapat kenaikan yang cukup tajam, mencapai 145,8 pada tahun 2019, sejalan dengan peningkatan perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Namun, sama seperti di bagian barat, setelah tahun 2020, terjadi penurunan drastis dalam alokasi, hingga hanya 44,4 pada tahun 2023.

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun provinsi bagian timur sempat mengalami peningkatan dalam penerimaan bantuan sosial, secara keseluruhan, proporsinya masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah barat. Perbedaan ini bisa dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kapasitas fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta kesiapan administrasi dalam mengelola anggaran bantuan sosial. Selain itu, penurunan tajam setelah 2020 baik di wilayah barat maupun timur diduga akibat adanya realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan anggaran bantuan sosial daerah menjadi lebih terbatas. Dengan mempertimbangkan perbedaan geografis, sosial ekonomi, serta tantangan pembangunan di wilayah timur, diperlukan strategi khusus untuk memastikan bahwa alokasi bantuan sosial lebih tepat sasaran dan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah di masa depan.

Di Indonesia, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam hal kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan antara wilayah barat dan timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendidikan, kesehatan, dan

APBD di bidang bantuan social terhadap tingkat kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Adapun alasan pemilihan objek penelitian yang berfokus pada 10 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan timur didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi human capital dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta bagaimana kebijakan daerah terkait anggaran dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di provinsi-provinsi Barat dan Timur yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan human capital dalam jangka Panjang , yang mencakup Pendidikan, Kesehatan, APBD terhadap kemiskinan di Indonesia di Wilayah Bagian Barat dan Timur . Adapun alasan yang mendasari penelitian ini adalah (1) Pengembangan human capital, yang mencakup Pendidikan, Kesehatan, APBD terhadap Tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi wilayah barat dan timur Indonesia (2) Menguji bagaimana investasi dalam modal manusia berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam jangka Panjang . Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengangkat tema “Analisis Human Capital terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2023”, dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh Human capital terhadap Pengurangan kemiskinan di Wilayah bagian Timur dan Barat. Untuk itu, penelitian ini mengidentifikasi 10 provinsi yang mewakili dua wilayah tersebut, dengan masing-masing provinsi memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tingkat pendidikan dan kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia

2. Bagaimana pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia
3. Bagaimana Pengaruh APBD (bantuan sosial) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh APBD (Bantuan Sosial) terhadap Tingkat kemiskinan di indonesia

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan human capital, yang mencakup Pendidikan, Kesehatan, APBD terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan data Data Panel dari tahun 2013 hingga 2023. Mengacu pada keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, penelitian ini memiliki batasan masalah untuk menjaga fokus dalam pembahasan. Fokus utama dari penelitian ini adalah variabel terikat, yaitu kemiskinan, sedangkan variabel bebas yang dianalisis meliputi faktor Human Capital terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yang dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang pengaruh human capital terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan data BPS, penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor human capital, seperti Pendidikan, Kesehatan, APBD Manfaat Praktis Hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, seperti peningkatan akses lapangan kerja, dan layanan dasar. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi sektor swasta dan lembaga internasional dalam merancang intervensi pembangunan.

2. Manfaat Sosial-Ekonomi

Penelitian ini membantu merumuskan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia.